



THE INFLUENCE OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS IN QUALITY FINANCIAL MANAGEMENT AT REGIONAL GOVERNMENT OF BONE DISTRICT (CASE STUDY OF REGIONAL REVENUE AGENCY)

Nur Kasifah¹, Muhammad idrus², Nurkurnia³.

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapi Bone.

¹Email: nurkasifah740@gmail.com

²Email: muhammadidrus425@gmail.com

³Email: nurkurniana86@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, Untuk mengetahui Basis Akuntansi yang digunakan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur kualitas laporan keuangan pemerintahan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Hasil penelitian 1) Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah positif pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. 2) Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang semakin baik maka akan dibarengi oleh kualitas laporan keuangan, Dengan kata lain standar akuntansi pemerintahan akan turut meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. 3) Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa jika skor dari standar akuntansi pemerintahan meningkat sebesar 1 (satu) satuan maka akan terjadi peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : *Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan.*

Abstract

Research Objectives: To determine and analyze the application of government accounting standards (SAP) which influences the quality of government financial reports at the Bone Regency Regional Revenue Agency, to determine the accounting basis used by the Government Accounting Standards (SAP) for the Bone Regency Regional Revenue Agency. This research uses quantitative methods to measure the quality of government financial reports at the Bone Regency Regional Revenue Agency. Research results 1) Government accounting standards have a significant effect on the quality of financial reports in a positive direction at the Bone Regency Regional Revenue Agency. 2) The better implementation of government accounting standards will be accompanied by the quality of financial reports. In other words, government accounting standards will help improve the quality of financial reports at the Bone Regency Regional Revenue Agency. 3) The results of this research prove that if the score of government accounting standards increases by 1 (one) unit, there will be an increase in the quality of financial reports.

Keywords: *Government Accounting Standards, Financial Management.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya kuantitas dan kompleksitas transaksi keuangan pemerintah daerah sangat membutuhkan pelaporan keuangan yang berkualitas dan sejalan dengan tuntutan perubahan yang dikehendaki stakeholder dalam hal ini adalah masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang merupakan kompilasi (Susunan) siklus keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan yang berawal dari pencatatan akuntansi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selaku entitas pelaporan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015.

Dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010: 21) peranan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Maka berdasarkan uraian tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sekaligus menuangkannya dalam skripsi dengan judul: "Pengaruh standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan yang berkualitas pada pemerintah Daerah Kabupaten Bone)."

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Tujuan pernyataan SAP ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang menyatakan bentuk isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan di sajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).

a. Akuntansi berbasis kas

Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

b. SAP Berbasis Akrual

Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

3. Proses Penyusunan SAP

Tahap-tahap penyiapan SAP Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja Pembahasan Draft oleh Komite Kerja Pengambilan Keputusan Draft untuk Dipublikasikan Peluncuran Draft Publikasian SAP (Exposure Draft) Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings) Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draft Publikasian Finalisasi Standar.

4. Penetapan SAP

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan yang semula disusun berdasarkan basis kas menuju akrual, berubah menjadi akrual penuh. Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, Standar dibahas bersama dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK. KSAP melakukan finalisasi standar KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan. Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan Keppres. melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menyempurnakan kembali draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK agar pada awal tahun 2005 dapat segera ditetapkan.

5. SAP Yang Berlaku di Indonesia

Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah 13 Juni Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan basis kas setelah itu diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual. PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP No.71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

6. PP No.71 Tahun 2010

Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju SAP yang Akrua digunakan dalam SAP mengakui pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24, belanja, Tahun 2005 dan pembiayaan SAP UU No. 17 tahun 2003 menyatakan bahwa Berbasis selama pengakuan dan pengukuran berbasis kas, serta pendapatan dan belanja berbasis akrual mengakui aset, utang, Kas belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan ekuitas, dana Menuju dan pengukuran berbasis kas, berbasis akrual. Akrua Pengakuan dan pengukuran pendapatan dinyatakan dalam bentuk PSAP dan belanja berbasis akrual menurut Pasal dilengkapi dengan Kerangka Konseptual 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dilaksanakan paling lambat lima tahun.dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Karena itu, PP No. 24 Tahun 2005 digantikan Nomor 71 Tahun 2010 dengan PP No. 71 Tahun 2010.

7. Perubahan PSAP

Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP kepada BPK untuk mendapat pertimbangan. Perubahan yang dimaksud adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP. Diharapkan akan adanya konsekuensi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas ditetapkannya pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik PP SAP (good governance). Untuk implementasi pada pemerintah daerah, Departemen Dalam Negeri telah membuat serangkaian kebijakan/strategi implementasi SAP, antara lain: Omnibus Regulation : Revisi PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan revisi Penerapan PP SAP disesuaikan dengan kondisi Pemda dalam penerapan sistem pertanggungjawaban sesuai Kepmendagri 29/2002.

Revisi dilaksanakan secara bertahap dan selektif Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi Pelaksanaan Daerah media Inkubator (DMI) secara sukarela dalam penerapan PP SAP. Evaluasi dan monitoring secara berkala dari pihak-pihak yang berwenang.

8. Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. mengenai pengelolaan keuangan daerah.

9. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No.1 tentang pembendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3) Laporan Arus kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pemerintah daerah selama periode tertentu.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan neratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

5) Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanjayang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomidan surplus atau defisit.

b. Tujuan Umum Laporan Keuangan dan Peranan Pelaporan Keuangan

1) Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi kebutuhan informasi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2) Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan terutama digunakan untuk digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya:

1) Relevan

Laporan keuangan biasa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mambantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

10. Pemeriksaan laporan Keuangan

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 23E Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketiga Undang-undang tersebut laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislative. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemeberian pendapat (opini).

11. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Keseimbangan Entitas bermakna laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Keterukuran dalam satuan uang diartikan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang menurut Sugiyono (2012:23) metode kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2008:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2008:116). Sampel dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dari tahun 2020 – 2022.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif yang memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: Standar akuntansi pemerintah (SAP) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden.

b. Sumber data.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung yang bersumber dari jawaban kuesioner dari responden. Untuk memperoleh data/informasi yang akurat maka penulis menggunakan pendekatan langsung kepada instansi yang

bersangkutan serta para pegawai badan pendapatan daerah Kabupaten Bone sebagai responden yang ada dalam instansi tersebut.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner (questionnaire), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada seluruh staf badan pendapatan daerah kabupaten bone. Selain itu untuk memperoleh dan melengkapi teori-teori yang berkenaan dengan landasan teori dan pemecahan masalah, maka dilakukan dengan membaca buku-buku ilmiah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini atau melalui studi kepustakaan.

5. Analisis Data

a. Uji validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan skor untuk masing-masing variabel. Proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23.0 dan Microsoft excel 2010.

b. Langkah Pengujian Hipotesis

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi sederhana, data tersebut harus diuji kenormalannya. Pengujian asumsi normalitas tersebut dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis sebagai berikut:

Ho: Data variabel dependen berdistribusi normal.

Ha: Data variabel dependen tidak berdistribusi normal. $\alpha : 5\%$

Setelah dilakukan pengujian normalitas tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi linear sederhana (Uji t).

Secara individual uji statistik yang digunakan adalah Uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel. Untuk menentukan nilai ttabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

Jika $thitung > ttabel (n-k)$ maka Ho ditolak,

Jika $thitung < ttabel (n-k)$ maka Ho diterima

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Analisis Regresi Sederhana

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah menggunakan Analisis Regresi sederhana, dimana analisis regresi adalah hubungan secara linear antara satu variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Analisis regresi sederhana menggunakan rumus persamaan seperti yang dikutip dalam sugiyono (2007:75), yakni:

$Y = a + bX$ Dimana:

Y = Kualitas Laporan keuangan Pemerintah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi dari variable X

X = Standar Akuntansi Pemerintahan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi responden adalah penjelasan tentang keberadaan tenaga kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, yang diperlukan sebagai informasi untuk mengetahui identitas sebagai responden dalam penelitian ini. Responden sebagai obyek penelitian yang memberikan interpretasi terhadap karakteristik responden untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penegelolaan Keuangan yang Berkualitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 15 orang, yang menjadi responden yang representatif untuk dikemukakan sebagai kelayakan responden dalam memberikan informasi mengenai identitas diri mulai dari jenis kelamin, pendidikan, posisi dan lama bekerja, lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, telah didapatkan data jumlah responden menurut jenis kelaminnya yaitu 6 orang responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 40% dan 9 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 60%.

b. Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, telah didapatkan data jumlah responden menurut pendidikan yaitu responden yang berpendidikan atau lulusan magister (S1) sebanyak 11 orang responden dengan persentase 73,3% dan responden yang berpendidikan atau lulusan sarjana (S2) sebanyak 4 orang responden dengan persentase 26,6%.

c. Responden Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, telah didapatkan data jumlah responden menurut jabatan yaitu Bidang Akuntansi sebanyak 5 orang responden dengan persentase 33,3%, Bidang Pendapatan 3 orang responden dengan persentase 20%, Bidang Anggaran 3 orang responden dengan persentase 20%, dan Bidang Asset dan Investasi 4 orang responden dengan persentase 26,7%.

2. Deskriptif Variabel

a. Responden Mengenai Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai tanggapan responden tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Deskriptif variabel Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai total skor 705 dari 15 responden. Skor tertinggi terdapat pada nomor 1 dengan pertanyaan “Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua” dengan skor 74. Sedangkan skor terendah terdapat pada nomor 12 dengan pernyataan ” Penyusunan Laporan Operasional sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 12” dengan skor 40. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada variabel ini, Standar Akuntansi Pemerintahan telah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan penerapan dan perencanaan Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Responden Mengenai Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Responden mengenai variabel kualitas laporan Keuangan yaitu mempunyai 6 butir pertanyaan antara lain: 1. Laporan keuangan pemerintah Harus relevan (tepat waktu dan lengkap). 2. Laporan keuangan pemerintahan bisa dapat diverifikasi (Andal). 3. Penyajian Laporan keuangan sudah memenuhi unsur netralitas. 4. Dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan sesuai standar akuntansi pemerintahan. 5. Laporan keuangan harus dapat di pahami sesuai dengan peraturan standar akuntansi pemerintahan. 6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan).

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai tanggapan responden tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Deskriptif variabel kualitas laporan Keuangan mempunyai total skor 406 dari 15 responden. Skor tertinggi terdapat pada nomor 6 dengan pertanyaan “Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi dan pelaporan)” dengan skor 71. Sedangkan skor terendah terdapat pada nomor 3 dengan pernyataan ” Penyajian Laporan keuangan sudah memenuhi unsur netralitas.” dengan skor 65.

3. Hasil Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan angket dalam mengumpulkan data. Uji validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi bivariate person dengan alat bantu program SPSS versi 20.0. Item angket dalam uji validitas dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada nilai signifikan 5%. Sebaliknya, item dikatakan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ pada nilai signifikan.

Angket persepsi mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan disimpulkan terdapat 5 item valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ menunjukkan pada nilai signifikan 5% sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian dan 7 item tidak valid dikarenakan $r_{hitung} < r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dengan tujuan mengetahui konsisten angket dilakukan dengan menggunakan rumus alpha. Uji signifikan dilakukan pada taraf $\alpha = 0.05$. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari rtabel (0.514).

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket X (Standar Akuntansi Pemerintahan) sebesar 0.665, dan angket Y (kualitas Laporan Keuangan) sebesar 0.790. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa angket yang valid dalam penelitian ini reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

c. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Jika data menyebar disekitar diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal (menyerupai lonceng), regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan hasil Uji Normalitas dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas karena data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran data searah mengikuti garis diagonal tersebut.

d. Pengujian Hipotesis

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel Standar

Akuntansi Pemerintahan (X) Terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).

H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan variabel Standar

Akuntansi Pemerintahan (X) Terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil Uji t, maka diperoleh thitung = 6.112 dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05 atau 5% maka derajat kesalahannya dapat dihitung dengan $df = (n-k) = 15-12= 3$ dan dari hasil ini diperoleh nilai ttabel sebesar 2.353. Hasil tersebut menunjukkan bahwa thitung > ttabel., karena nilai thitung = 6.112 lebih besar dari ttabel = 2.353, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan Keuangan. Dari output diatas dapat diketahui nilai thitung = 6.112 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai thitung > ttabel sehingga H_0 ditolak dalam artian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

e. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut:

Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintahan

Diketahui besarnya nilai korelasi atau hubungan R adalah sebesar 0.861 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R^2 sebesar 0.742, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh Variabel bebas (Standar Akuntansi Pemerintahan) terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan) adalah sebesar 74.2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh Variabel lain yang diluar penelitian ini.

f. Analisis Regresi Linear Sederhana

Pembuatan persamaan regresi sederhana dapat dilakukan dengan menginterpretasikan angka-angka didalam unstandardized coefficient beta

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Coefficients, pada kolom B pada constant (a) adalah 0.956, sedangkan nilai Standar Akuntansi Pemerintahan (b) adalah 0.556, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = a + bX \text{ atau } 0.956 + 0.556X$$

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan penambahan bila (b) bertanda positif dan penurunan bila (b) bertanda negatif. Sehingga dari persamaan dapat diterjemahkan :

5) Konstanta sebesar 0.956 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai Standar Akuntansi Pemerintahan maka nilai Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0.956.

6) Koefisien regresi X sebesar 0.556 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai Standar Akuntansi Pemerintahan, maka nilai Kualitas Laporan Keuangan bertambah sebesar 0.556.

F. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dengan arah positif. Hal ini akan dibuktikan dengan pengujian hipotesis uji t, dimana nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel sehingga H_0 ditolak dalam artian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, nilai signifikan yang diperoleh dalam penelitian ini kurang dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan juga signifikan, dan dengan melihat hasil dari koefisien regresi dengan arah positif maka pengaruh yang dihasilkan juga positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah baik maka Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan juga akan baik. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, menunjukkan besarnya

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah positif pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang semakin baik maka akan dibarengi oleh kualitas laporan keuangan, Dengan kata lain standar akuntansi pemerintahan akan turut meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
3. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa jika skor dari standar akuntansi pemerintahan meningkat sebesar 1 (satu) satuan maka akan terjadi peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan koefisien determinasi besarnya pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah sebesar 74.2%..

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2004, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat: Jakarta.

BPK. RI. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Gorontalo Tahun 2011.

Darise Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : PT. Indeks

Edisi Pertama, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta IAPI, Standar Akuntan Publik. Jakarta, 2004.

Ghozali Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi ketiga, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hariadi, Ppramono, Yanuar E. Restiyantodan I.R Bawono. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Alfabeta Bandung.

Hartina, Silka. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi Akuntansi Universitas Sumatera Utara.

Hasan, Iqbal, 2008. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Forecasting Unimaju

Moh.Nazir, 2003, Metode Penelitian, Ghalia: Jakarta.

Mahmudi,2006,Analisis laporan keuangan pemerintah daerah, UPP Stim YKPN: Yogyakarta.

Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Renyowijoyo Muindro, 2008. Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba

Pautina,Indriyani.2011.Pengaruh Penyajian Laporan keuangan pemerintah kota Gorontalo. Skripsi S1 Akuntansi UNG

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Keuangan Daerah.

SAP. 2010. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Fokus Media Bandung.

Sugiyono. 2009. MetodePenelitianBisnis. Bandung :Alfabeta.

Tanjung, Abdul Hafiz, 2008. Akuntansi Pemerintahan daerah,Konsep dan Aplikasi, Cetakan Kedua, Alfabeta Bandung.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara